

Kandidasi Dalam Partai Politik di Indonesia
(Studi Kasus Penetapan Calon Legislatif Partai Gerindra pada
Pemilihan Legislatif tahun 2019 di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



Oleh :

Zata Qamarina

1710833017

Pembimbing :

- 1. Dr. Aidinil Zetra, S.IP., MA.**
- 2. Mhd Fajri, S.IP., MA.**

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

2021

ABSTRAK

Zata Qamarina, 1710833017. Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, dengan judul Skripsi “Kandidasi Prtai Politik di Indonesia (Studi kasus Penetapan Calon Legislatif Partai Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Kota Padang Tahun 2019”. Dibimbing oleh **Dr. Aidinil Zetra S.IP M.A dan Mhd Fajri S.IP MA**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kandidasi calon wakil rakyat ditingkat daerah yang langsung dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat tanpa melibatkan Dewan Pengurus Cabang dalam penetapan anggota legislatif. Temuan data awal dalam penelitian ini menemukan bahwa pada AD/ART pada Partai Gerindra belum mengakomodasi daerah untuk terlibat dalam penetapan calon legislatif. Asumsi dalam penelitian ini adalah terjadinya sentralisasi dalam proses penetapan calon legislatif di Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode pemilihan informan dengan teknik *snow ball*. Peneliti menggunakan konsep sentralistik partai politik dari Nurhaliyah Nurdin dan teori rekrutmen politik. Pada konteks sentralisasi politik terdapat tiga kategori umum menurut Nurhaliyah Nurdin, kategori tersebut seperti *person* atau sumber daya manusia pada penelitian ini, proses rekrutmen bacaleg partai Gerindra, keputusan final berada pada putusan DPP, dan DPC/DPD secara mutlak menerima putusan itu, walaupun memang putusan tersebut hasil musyawarah mufakat antara DPC/DPD dengan DPP internal dan elit partai Gerindra, indikator kedua adalah keuangan atau *money*, AD-ART Partai Gerindra juga mengatur bahwa segala kegiatan pendanaan juga persetujuan oleh DPP Pusat. Indikator ketiga *policy* atau kebijakan, dalam Partai Gerindra kecenderungan sentralistik memang terlihat adanya, namun dibungkus dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat demokrasi aktif seperti menanggapi masukan-masukan masyarakat namun dalam pengelolaan partai, Partai Gerindra cenderung sangat sentralistik selian itu, bentuk Partai Gerindra yang merupakan Partai Mandat juga mempengaruhi bagaimana proses rekrutmen bacaleg di daerah yang harus mendapatkan mandat terlebih dahulu dari Dewan Pengurus Pusat.

Kata kunci : Sentralistik, Partai Politik. Rekrutmen Partai Politik, Calon Legislatif

ABSTRACT

Zata Qamarina, 1710833017. Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, with the thesis title "Political Party Candidates in Indonesia (Case Study of Determination of Gerindra Party Legislative Candidates in the 2019 Padang City Legislative Election". Supervised by Dr. Aidinil Zetra S.IP MA and Mhd Fajri S.IP MA

This research is motivated by the phenomenon of candidacy of candidates for people's representatives at the regional level which is directly carried out by the Central Executive Board without involving the Branch Management Board in determining the members of the legislature. Initial data findings in this study found that the AD/ART of the Gerindra Party has not accommodated regions to be involved in determining legislative candidates. The assumption in this study is that there is a centralization in the process of determining legislative candidates in the Gerindra Party in the 2019 Legislative Election. This study uses a qualitative approach with a case study method and the method of selecting informants with the snow ball technique. The researcher uses the centralistic concept of political parties from Nurhaliah Nurdin and the theory of political recruitment. In the context of political centralization, according to Nurhaliah Nurdin, there are three general categories, such as the person or human resources in this study, the recruitment process for the legislators of the Gerindra party, the final decision rests with the DPP decision, and the DPC/DPD absolutely accepts the decision, even though it is a decision. the result of consensus deliberation between the DPC/DPD with the internal DPP and the elite of the Gerindra party, the second indicator is finance or money, the AD-ART of the Gerindra Party also stipulates that all funding activities are also approved by the Central DPP. The third indicator of policy or policy, seen in the Gerindra Party, it can be seen that the centralistic tendency of the Gerindra Party is indeed visible, but it is wrapped in activities that are characterized by the Gerindra Party, which is a very active democratic party in responding to public input, but in party management, the Gerindra Party tends to be very active. Apart from that, the form of the Gerindra Party which is the Mandate Party also affects how the legislative and legislative recruitment process in the regions must first obtain a mandate from the Central Executive Board.

Keyword : Centralized, Political Party. Recruitment of Political Parties, Legislative Candidate